



PROFIL PNS KABUPATEN BATANG

PERIODE OKTOBER 2023

REGISTER BPS : K-22.3325.001

Jumlah PNS Kabupaten Batang Berdasarkan

1. PANGKAT DAN GOLONGAN
2. ESELON JABATAN
3. TINGKAT PENDIDIKAN
4. JENIS KELAMIN
5. AGAMA
6. USIA

SIMPEG BKD KAB.BATANG
BIDANG MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk menyusun PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE OKTOBER 2023 ini. Profil ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu **Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel**, dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”**.

PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE OKTOBER 2023 ini disusun sebagai salah satu penyedia informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Semoga PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE OKTOBER 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Batang, 31 Oktober 2023
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN BATANG

DWI RIYANTO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607101996021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG.....	3
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 METODE PENYUSUNAN DATA.....	6
1. PENGUMPULAN DATA.....	6
2. PENYAJIAN DATA.....	6
BAB II HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI.....	1
TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN.....	2
TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN.....	2
TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	3
TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA.....	4
TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI.....	6
TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN.....	6
TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN.....	7
TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA.....	9
TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA).....	17
TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL 2.14 JUMLAH PNS BERDASARKAN AGAMA PER-OPD.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL 2.15 JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER-OPD.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajahi, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas- tugas di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Badan Kepegawaian Daerah Batang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dimana diantaranya mencakup pengelolaan data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk

aneka informasi Statistik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi data kepegawaian yang telah disusun sering dimanfaatkan oleh unit kerja, lembaga-lembaga di luar kepegawaian. Kenyataan ini melahirkan pemikiran perlunya data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dibuat dalam bentuk Profil Laporan, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam kualitas sajian yang menarik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Profil PNS Kabupaten Batang Bulan Oktober Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
- f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 13);
- g. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);

1.3. Maksud dan Tujuan

Profil PNS Pemerintah Kabupaten Batang Bulan Oktober 2023 mengandung maksud dan tujuan:

1. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 44 (empat puluh empat) perangkat daerah sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang.
3. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka

- perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
4. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Batang

1.4 Metode Penyusunan Data

Penyusunan PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE OKTOBER 2023 disusun dengan langkah-langkah dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan melakukan peremajaan secara rutin data Sistem Informasi Kepegawaian yang dilakukan oleh Admin OPD dan diolah oleh tim pengelola database kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dan proses sinkronisasi data / verifikasi dan validasi data kepegawaian. Data kepegawaian yang terkumpul merupakan data akhir dan terbaru, dengan maksud guna memperoleh data yang sesuai dengan peraturan perundangan, tepat, akurat dan akuntabel.

2. Penyajian Data

Data kepegawaian hasil update dari masing-masing instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Batang merupakan data kuantitatif, selanjutnya dihimpun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel, untuk selanjutnya dianalisa lalu diambil konklusi sesuai kebutuhan.

BAB II

HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengolahan data kepegawaian sampai dengan 31 Oktober 2023 diperoleh data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan
2. Jumlah PNS berdasarkan Eselon Jabatan
3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
5. Jumlah PNS berdasarkan Agama
6. Jumlah Jabatan Yang Tersedia dan Terisi
7. Jumlah PNS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional
8. Jumlah PNS berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah PNS Kabupaten Batang keadaan Bulan **Oktober 2023 adalah 5.350** PNS terinci sebagai berikut :

Jumlah PNS Kabupaten Batang keadaan Bulan **Oktober 2023**
5.350 PNS

TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Golongan	Pangkat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/c	Juru	5	1	6
I/d	Juru Tingkat I	57	5	62
II/a	Pengatur Muda	33	2	35
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	76	5	81
II/c	Pengatur	205	117	322
II/d	Pengatur Tingkat I	202	55	257
III/a	Penata Muda	336	569	905
III/b	Penata Muda Tingkat I	340	474	814
III/c	Penata	240	477	717
III/d	Penata Tingkat I	339	616	955
IV/a	Pembina	354	422	776
IV/b	Pembina Tingkat I	161	195	356
IV/c	Pembina Utama Muda	49	15	64
	Jumlah	2397	2953	5350

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS terbanyak adalah PNS Golongan III (3391 PNS) , diikuti PNS Golongan IV (1196 PNS), PNS Golongan II (695 PNS) dan jumlah PNS terendah adalah PNS Golongan I (68 PNS).

TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN

Jenis Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Total
Jabatan Fungsional Tertentu	NON	1297	2412	3709
Jabatan Fungsional Umum	NON	839	398	1237
Jabatan Struktural	II.b	25	1	26
Jabatan Struktural	III.a	44	6	50
Jabatan Struktural	III.b	61	35	96
Jabatan Struktural	IV.a	98	72	170
Jabatan Struktural	IV.b	33	29	62
		2397	2953	5350

TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S-3/Doktor	3	1	4
S-2	201	163	364
S-1/Sarjana	1312	1837	3149
Diploma IV	24	76	100
Diploma III/Sarjana Muda	176	694	870
Diploma II	45	24	69
Diploma I	1	4	5
SLTA Kejuruan	44	10	54
SLTA	442	127	569
SLTP Kejuruan	1	0	1
SLTP	102	9	111
Sekolah Dasar	46	8	54
Jumlah	2397	2953	5350

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS terbanyak adalah PNS dengan Pendidikan S-1/Sarjana (3149 PNS) , diikuti PNS dengan pendidikan Diploma III (870 PNS), dan jumlah PNS terendah adalah PNS dengan pendidikan S3 (4 PNS).

TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA

No	UNOR	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26	0	1	0	0	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	0	0	0	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	67	1	1	0	0	0	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25	0	0	0	0	0	25
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	54	0	0	0	0	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37	0	1	0	0	0	38
7	DINAS KESEHATAN	778	2	7	0	1	0	788
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	18	0	0	0	0	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27	0	0	0	0	0	27
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50	0	1	0	0	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	71	0	0	0	0	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31	0	0	0	0	0	31
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	127	0	0	0	0	0	127
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	0	0	0	0	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26	0	0	0	0	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	0	0	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2777	13	22	0	0	0	2812
18	DINAS PERHUBUNGAN	44	1	1	0	0	0	46
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	76	0	0	0	0	0	76
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33	0	0	0	0	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36	0	1	0	0	0	37
22	DINAS SOSIAL	20	0	0	0	0	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	45	0	0	0	0	0	45

24	KECAMATAN BANDAR	19	0	0	0	0	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	12	0	0	0	0	0	12
26	KECAMATAN BATANG	71	0	0	0	0	0	71
27	KECAMATAN BAWANG	13	0	0	0	0	0	13
28	KECAMATAN BLADO	11	0	0	0	0	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	12	0	0	0	0	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	11	0	0	0	0	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	11	0	0	0	0	0	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	8	0	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	17	0	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	12	0	0	0	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	12	0	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	13	0	0	0	0	0	13
37	KECAMATAN WARUNGASEM	12	0	0	0	0	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	0	0	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23	0	1	0	0	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	324	2	2	0	1	0	329
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	95	0	1	0	0	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45	1	0	0	0	0	46
43	SEKRETARIAT DAERAH	99	0	0	0	0	0	99
44	SEKRETARIAT DPRD	29	0	0	0	0	0	29
	JUMLAH	5286	22	40	0	2	0	5350

Dari Tabel 2.5 terlihat jumlah PNS dengan agama mayoritas adalah Islam sebanyak 98% (5286 PNS) dari seluruh PNS sisanya dibagi oleh Protestan (40 PNS), Katholik (22 PNS), Budha (2 PNS) dan Hindu (0 PNS).

TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI

Eselon	Tersedia	Terisi	Kosong
2.a	1	0	1
2.b	32	26	6
3.a	56	52	4
3.b	105	96	9
4.a	190	170	20
4.b	76	62	14
TOTAL	460	406	54

Dari Tabel 2.6 terlihat jumlah jabatan yang paling banyak kekosongan adalah Eselon IV/a (20 jabatan), hanya terisi 170 dari 190 jabatan yang tersedia

TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Guru	4	3	7
2	GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA	0	1	1
3	GURU KELAS AHLI PERTAMA	15	27	42
4	Guru Madya	336	469	805
5	Guru Muda	285	564	849
6	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	10	15	25
7	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	3	0	3
8	Guru Pertama	196	301	497
9	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	0	1	1
10	Pamong Belajar Madya	2	0	2
11	Pamong Belajar Pertama	0	1	1
12	PAMONG BUDAYA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SEJARAH, TRADISI DAN TENAGA KEBUDAYAAN	0	1	1
13	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	1	0	1
14	Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP Madya	0	1	1
15	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KURIKULUM DAN PENILAIAN SMP	1	0	1
16	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KURIKULUM, PENILAIAN, PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK DAN PEM	1	0	1
17	Pengawas Sekolah Madya	33	12	45

18	Pengawas Sekolah Madya - TK/SD	1	1	2
19	Pengawas Sekolah Muda	1	5	6
20	Penilik Madya	6	0	6
21	Penilik Muda	2	1	3
	Jumlah	897	1403	2300

Dari Tabel 2.7 diatas jumlah fungsional Pendidikan terbanyak disi oleh jabatan Guru (2229 PNS) dari 2300 PNS fungsional pendidikan

TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
2	Apoteker Ahli Madya / Madya	1	3	4
3	Apoteker Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	4	4
4	Apoteker Penyelia	0	1	1
5	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	0	6	6
6	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan Non BLUD	1	2	3
7	Asisten Apoteker Penyelia	1	13	14
8	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	0	4	4
9	Bidan Ahli Madya / Madya	0	17	17
10	Bidan Ahli Muda / Muda	0	40	40
11	Bidan Ahli Pertama / Pertama	0	21	21
12	Bidan Mahir / Lanjutan	0	96	96
13	Bidan Pelaksana Lanjutan	0	114	114
14	Bidan Penyelia	0	91	91
15	Bidan Terampil / Pelaksana	0	35	35
16	Dokter Ahli Madya / Madya	22	27	49
17	Dokter Ahli Muda / Muda	0	3	3
18	DOKTER AHLI PERTAMA	1	1	2
19	Dokter Ahli Pertama / Pertama	7	7	14
20	Dokter Gigi Ahli Madya / Madya	1	4	5
21	Dokter Gigi Ahli Pertama / Pertama	0	7	7
22	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	1	0	1
23	DOKTER SPESIALIS MATA AHLI PERTAMA	0	1	1
24	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	0	2	2
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda / Muda	2	0	2
26	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	1	2	3
27	Fisioterapis Ahli Pertama / Pertama	0	1	1

28	Fisioterapis Mahir / Lanjutan	1	0	1
29	Fisioterapis Penyelia	1	0	1
30	Nutrisionis Ahli Madya / Madya NON BLUD	0	1	1
31	Nutrisionis Ahli Muda / Muda	0	6	6
32	Nutrisionis Ahli Pertama / Pertama	1	0	1
33	Nutrisionis Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	1	1
34	Nutrisionis Mahir / Lanjutan	0	1	1
35	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	0	2	2
36	Nutrisionis Penyelia	0	12	12
37	Okupasi Terapis Terampil / Pelaksana	0	1	1
38	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama / Kerja Pertama	0	1	1
39	Penata Anestesi Ahli Madya	1	1	2
40	Penata Anestesi Ahli Muda	2	0	2
41	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	3	4
42	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya / Masyarakat Madya	1	0	1
43	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MADYA NON BLUD	1	0	1
44	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	2	0	2
45	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA - NON BLUD	0	1	1
46	Perawat Ahli Madya	8	21	29
47	Perawat Ahli Muda	13	18	31
48	Perawat Ahli Pertama	15	6	21
49	Perawat Gigi Ahli Muda	0	1	1
50	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1	2	3
51	Perawat Gigi Penyelia	1	16	17
52	Perawat Gigi Terampil	1	5	6
53	Perawat Madya	4	9	13
54	Perawat Mahir	1	5	6
55	Perawat Muda	4	10	14
56	Perawat Pelaksana	2	0	2
57	Perawat Pelaksana Lanjutan	4	15	19
58	Perawat Penyelia	64	144	208
59	Perawat Pertama	1	1	2
60	Perekam Medis Pelaksana	5	6	11
61	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
62	Perekam Medis Penyelia	1	5	6
63	Perekam Medis Penyelia NON BLUD	1	0	1
64	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya / Kesehatan Madya	1	0	1

65	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda / Kesehatan Muda	0	2	2
66	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1	2	3
67	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	6	7
68	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia NON BLUD	0	1	1
69	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	5	8	13
70	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana Non BLUD	3	1	4
71	Radiografer Pelaksana	0	2	2
72	Radiografer Penyelia	3	3	6
73	Refraksionis Optisien Penyelia	0	1	1
74	Refraksionis Optisien Terampil / Pelaksana	0	2	2
75	Sanitarian Ahli Madya / Madya	0	2	2
76	Sanitarian Ahli Pertama / Pertama	1	1	2
77	Sanitarian Penyelia	2	4	6
78	TEKNIK ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	0	1
79	Teknisi Elektromedis Ahli Muda / Muda	0	1	1
80	Teknisi Elektromedis Pelaksana	3	0	3
81	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	0	1	1
82	Teknisi Gigi Terampil / Pelaksana	2	0	2
83	Teknisi Transfusi Darah Terampil / Pelaksana	1	1	2
84	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	0	1
		201	835	1036

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat jumlah fungsional Kesehatan terbanyak diisi oleh jabatan Bidan (414 PNS) dari 1036 PNS fungsional Kesehatan dan jabatan Perawat (372 PNS), sedangkan Dokter (70 PNS) dan Dokter Gigi (12 PNS).

TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN	1	0	1
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DATA, INFORMASI DAN KERJASAM	0	1	1
3	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1	0	1
4	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	1	0	1

5	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MUDA (PB)	0	1	1
6	ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA	0	1	1
7	ANALIS HUKUM AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI	0	1	1
8	ANALIS HUKUM MUDA (PB)	0	1	1
9	ANALIS KEBENCANAAN MUDA (PB)	2	0	2
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	2	4	6
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1	0	1
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR ASPIRASI DAN DOKUMENTASI	1	0	1
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN	1	0	1
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGANGGARAN	1	0	1
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGAWASAN	1	0	1
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	0	1	1
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1	0	1
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	1	1
19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	1	1
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	1	0	1
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYUSUN PROGRAM	1	0	1
22	ANALIS KEBIJAKAN MUDA (PB)	5	3	8
23	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PE	0	1	1
24	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	1	1	2
25	Analisis Kepegawaian Muda	0	1	1
26	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR FORMASI DAN PENGEMBANGAN	1	0	1
27	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR JABATAN	0	1	1
28	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR KENAIKAN PANGKAT	0	1	1
29	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	0	1	1
30	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN	0	1	1

31	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	0	1	1
32	Analisis Kepegawaian Pelaksana / Terampil	0	3	3
33	Analisis Kepegawaian Pelaksana / Terampil (BLUD)	1	0	1
34	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	0	1	1
35	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	1	1
36	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN	1	0	1
37	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	0	3	3
38	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	2	2	4
39	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA (PB)	2	4	6
40	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
41	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA	0	1	1
42	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	1	0	1
43	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN	0	1	1
44	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	0	1	1
45	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
46	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENELITIAN	0	1	1
47	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN PASAR	1	0	1
48	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	0	1	1
49	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	0	1	1
50	ANALIS PERDAGANGAN MUDA (PB)	2	0	2

51	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	2	0	2
52	ARSIPARIS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	1	0	1
53	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	0	2	2
54	Arsiparis Mahir	0	1	1
55	ARSIPARIS MUDA (PB)	0	1	1
56	Arsiparis Pelaksana	0	2	2
57	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
58	Arsiparis Penyelia	2	0	2
59	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	5	0	5
60	ASSESOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	1
61	AUDITOR AHLI PERTAMA	0	3	3
62	Auditor Madya	2	1	3
63	Auditor Muda	3	7	10
64	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	2	0	2
65	Instruktur Muda	0	1	1
66	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	0	1	1
67	Mediator Hubungan Industrial Pertama	1	0	1
68	Medik Veteriner Muda (PB)	0	1	1
69	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator Siak) Terampil	9	6	15
70	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	1	0	1
71	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	0	1	1
72	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	0	1
73	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	1
74	PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN OLAHRAGA	0	1	1
75	Pemadam Kebakaran Terampil	3	0	3
76	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	1	1	2
77	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN REPRODUKSI, PENGENDA	0	1	1
78	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PELAYANAN KELUAR	1	0	1
79	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGGERAKAN INSTITUSI DAN PERA	1	0	1

80	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYULUH DAN PENGGERAKAN	0	1	1
81	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA (PB)	0	1	1
82	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEDARURATAN DAN LOGISTIK	0	1	1
83	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA (PB)	1	1	2
84	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	1	2	3
85	PENATA RUANG AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG	1	0	1
86	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	1	2
87	PENATA RUANG MUDA (PB)	0	1	1
88	Penera Ahli Pertama	0	2	2
89	Penera Pelaksana	1	1	2
90	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	0	1	1
91	Pengantar Kerja Pertama	0	2	2
92	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN	1	0	1
93	Pengawas Bibit Ternak Muda	1	0	1
94	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	1	1	2
95	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	1	0	1
96	Pengawas Bibit Ternak Pertama	0	1	1
97	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA (PB)	1	0	1
98	Pengawas Kemetrologian Pertama	1	0	1
99	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, PERIJINAN, KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERAT	1	0	1
100	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
101	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PRODUKSI PERKEBUNAN	1	0	1
102	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SARANA PRASARANA DAN USAHA PETERNAKAN	1	0	1
103	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA (PB)	0	1	1

104	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
105	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	2	1	3
106	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Madya	5	1	6
107	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda	1	7	8
108	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Pertama	0	1	1
109	Pengawas Perikanan Pelaksana	1	0	1
110	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN, LINGKUNGAN DAN KAWASAN BUDIDAYA	0	1	1
111	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	1
112	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	3	0	3
113	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	7	0	7
114	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	1	0	1
115	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA (PB)	0	1	1
116	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0	1	1
117	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH	1	0	1
118	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA (PB)	0	1	1
119	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI PERTAMA	0	1	1
120	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PELAKSANA/TERAMPIL	0	1	1
121	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	0	1	1
122	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI	1	0	1
123	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	1	0	1
124	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	1	0	1
125	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA (PB)	2	2	4
126	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	2	0	2

127	PENYULUH PERINDUSTRIAN MUDA (PB)	2	0	2
128	Penyuluh Pertanian Madya	9	1	10
129	Penyuluh Pertanian Muda	7	4	11
130	PENYULUH PERTANIAN MUDA (PB)	0	2	2
131	Penyuluh Pertanian Pelaksana	0	2	2
132	Penyuluh Pertanian Pertama	3	9	12
133	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	0	1	1
134	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	2	0	2
135	PENYULUH SOSIAL MUDA (PB)	1	0	1
136	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	1	1
137	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	1	0	1
138	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMERINTAHAN	0	1	1
139	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH	1	0	1
140	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1	0	1
141	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM	3	0	3
141	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN	3	1	4
142	Perencana Muda	0	1	1
143	PERENCANA MUDA (PB)	8	5	13
144	Perencana Pertama	2	2	4
145	PERISALAH LEGISLATIF MUDA (PB)	1	0	1
146	Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana	3	0	3
147	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PIMPINAN	1	0	1
148	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA (PB)	1	1	2
149	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	0	1	1
150	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	0	2	2
151	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEHUMASAN DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	1	0	1
152	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1	0	1

153	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN OPINI DAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	0	1	1
154	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	0	1
155	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	1	0	1
156	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	2
157	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	4	5	9
158	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan BLUD	0	1	1
159	Pranata Komputer Pertama	4	3	7
160	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR LAYANAN, INFORMASI, OTOMASI DAN KERJASAMA	0	1	1
161	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	0	1	1
162	Pustakawan Pelaksana	1	1	2
163	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
164	SANDIMAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	1	0	1
165	STATISTISI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR STATISTIK SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN BUDAYA	1	0	1
166	STATISTISI MUDA (PB)	0	1	1
167	Statistisi Pelaksana	0	1	1
168	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
169	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	3	0	3
170	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA (PB)	1	0	1
171	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	3	2	5
172	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	1	0	1
173	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	1	0	1
174	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1
175	Teknik Pengairan Pelaksana	2	0	2
176	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN KAWAS	1	0	1
177	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	1	1	2
178	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS P	0	1	1
179	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN	0	1	1
180	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRAS	1	0	1
181	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA -	1	0	1

	SUBKOORDINATOR PERTAMANAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM			
182	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1
183	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA (PB)	0	2	2
184	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	1	1	2
185	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	2	3
	Jumlah	199	174	373

Dari Tabel 2.9 diatas jumlah fungsional Lainnya terbanyak dari jabatan Penyuluh Pertanian (37 PNS) dari 373 PNS fungsional Lainnya.

TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING	1	1	2
2	AJUDAN	0	1	1
3	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1	0	1
4	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	0	1	1
5	ANALIS BENCANA	1	1	2
6	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	1	4
7	ANALIS HUMAS	1	2	3
8	ANALIS IDEOLOGI	1	0	1
9	ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	1	0	1
10	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	1	0	1
11	ANALIS JABATAN	0	1	1
12	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	0	1	1
13	ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA	1	0	1
14	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	0	1	1
15	ANALIS KELUARGA BERENCANA	1	0	1
16	ANALIS KEMASYARAKATAN	0	1	1
17	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA/TERAMPIL	1	0	1
18	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	0	5
19	ANALIS KESEHATAN	2	1	3
20	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	0	1
21	ANALIS KEUANGAN	0	2	2
22	ANALIS LAHAN PERTANIAN	1	0	1
23	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	0	1
24	ANALIS LAYANAN UMUM	4	8	12
25	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	1	1
26	ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	1	2
27	ANALIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	2	1	3
28	ANALIS PARIWISATA	0	1	1
29	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
30	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	0	1	1
31	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	1	0	1
32	ANALIS PENDIDIKAN	2	0	2
33	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	2	0	2

34	ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	0	1	1
35	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	1	0	1
36	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2	0	2
37	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS (BLUD)	1	0	1
38	ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	1	1	2
39	ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	1	0	1
40	ANALIS PERBENDAHARAAN	1	0	1
41	ANALIS PEREKONOMIAN	1	1	2
42	ANALIS PERPUSTAKAAN	1	0	1
43	ANALIS PERTANAHAN	0	1	1
44	ANALIS PESERTA DIDIK	3	1	4
45	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	0	1	1
46	ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	2	0	2
47	ANALIS PRODUK HUKUM	1	3	4
48	ANALIS PROTOKOL	0	2	2
49	ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	0	1	1
50	ANALIS TAMAN	1	0	1
51	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	0	1	1
52	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	1	3
53	BENDAHARA	6	5	11
54	BIDAN TERAMPIL	0	7	7
55	BINATU RUMAH SAKIT	2	0	2
56	DOKTER GIGI - AHLI PERTAMA	0	1	1
57	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	1	0	1
58	GURU	8	5	13
59	GURU KELAS AHLI PERTAMA	16	49	65
60	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	0	1	1
61	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	44	55	99
62	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	1	1	2
63	JURU PUNGUT RETRIBUSI	45	2	47
64	OPERATOR ALAT BERAT	1	0	1
65	OPERATOR MESIN	1	0	1
66	OPERATOR RADIO	1	1	2
67	OPERATOR TERMINAL	15	0	15
68	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	1	0	1
69	PEMELIHARA JALAN	14	0	14
70	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	1	0	1
71	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA	1	0	1
72	PENELAAH PERKEMBANGAN BUMD	1	0	1
73	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	0	1
74	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	1
75	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	1	3
76	PENGADMINISTRASI PERIJINAN	1	0	1
77	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	1	2	3
78	PENGADMINISTRASI UMUM	283	88	371
79	PENGADMINISTRASI UMUM BLUD	8	10	18
80	PENGADMINISTRASIAN UMUM	6	1	7
81	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	1	0	1
82	PENGAWAS KOPERASI	1	0	1
83	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	1	0	1
84	PENGAWAS SATUAN PELAYANAN	1	0	1

85	PENGELOLA ADAT DAN KESENIAN	2	0	2
86	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2	1	3
87	PENGELOLA BARANG	1	0	1
88	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	4	4	8
89	PENGELOLA BENGKEL	2	0	2
90	PENGELOLA DATA	9	6	15
91	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2	0	2
92	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	3	0	3
93	PENGELOLA DATA PELAYANAN	1	1	2
94	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	1	0	1
95	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	3	4	7
96	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	0	1	1
97	PENGELOLA GAJI	0	1	1
98	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	2
99	PENGELOLA KEPERAWATAN	1	0	1
100	PENGELOLA KEUANGAN	52	48	100
101	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	0	1	1
102	PENGELOLA LABORATORIUM	1	2	3
103	PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	0	3	3
104	PENGELOLA PASAR	1	0	1
105	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	1	0	1
106	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	1	4	5
107	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
108	PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	2	0	2
109	PENGELOLA PENDAPATAN	2	0	2
110	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	1	0	1
111	PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI PERTAMA	0	2	2
112	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	1	2	3
113	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	1	1
114	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	2	8	10
115	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1	2	3
116	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	0	1	1
117	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	1	0	1
118	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0	1	1
119	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
120	PENGEMUDI	11	0	11
121	PENGEMUDI AMBULANCE	4	0	4
122	PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	1	0	1
123	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	1	0	1
124	PENJAGA PINTU AIR	6	0	6
125	PENYULUH KEPEMUDAAN	1	0	1
126	PENYULUH KOPERASI	0	1	1
127	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
128	PENYULUH WISATA	1	0	1
129	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	5	12
130	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN	1	0	1

MASYARAKAT				
131	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	1	0	1
132	PENYUSUN RENCANA MUTASI	1	0	1
133	PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	1	0	1
134	PETUGAS KEAMANAN	6	0	6
135	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	13	0	13
136	PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	0	1	1
137	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA / TERAMPIL	2	1	3
138	PRAMU BAKTI	106	6	112
139	PRAMU KEBERSIHAN	43	2	45
140	PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN	0	1	1
141	PRANATA KEARSIPAN	0	1	1
142	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	1
143	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	1	0	1
144	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	1	0	1
145	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	0	1
146	PRANATA TATA PRAJA	2	1	3
147	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	2	0	2
148	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	0	6
149	TENAGA GURU	1	10	11
150	VERIFIKATOR KEUANGAN	1	1	2
	Jumlah	839	398	1237

Dari Tabel 2.10 diatas jumlah fungsional Umum (Pelaksana) terbanyak dari jabatan Pengadministrasi Umum (396 PNS) dari 1.237 PNS fungsional umum.